
ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, TINGKAT PENDIDIKAN, ANGKATAN KERJA, DAN PERPAJAKAN TERHADAP DISPARITAS PENDAPATAN DI PROVINSI JAWA TIMUR

Oleh :

Ditta Rosalitta,

Prodi Ekonomi Pembangunan, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Email: dittarosalitta90@gmail.com

Sri Muljaningsih,

Prodi Ekonomi Pembangunan, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Email: sri.muljaningsih.ep@upnjatim.ac.id

Articel Info

Article History :

Received 24 February - 2022

Accepted 24 March - 2022

Available Online 30 March - 2022

Abstract

The benchmark for success in the administration of inter-regional governance is to create harmony between economic growth and social welfare that is just and equitable. The goal of this study was to see how much economic growth, education level, labor force, and taxation influenced income disparities in East Java Province. This type of research is classified as quantitative descriptive research. The IBM SPSS (Statistical Package for Social Science) Version 26 was used as the analytical tool in this study. The data for this study were gathered from the Central Statistics Agency of East Java Province between 2010 and 2020 and the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia between 2010 and 2020. According to the findings of this study, economic growth (X1) and education level (X2) have no significant effect on income disparities in East Java Province. While the labor force (X3) has a significant impact on income disparities in East Java Province, taxation (X4) has a significant impact.

Keywords :

Economic Growth, Education Level, Labor Force, Taxation, Income Disparities

1. PENDAHULUAN

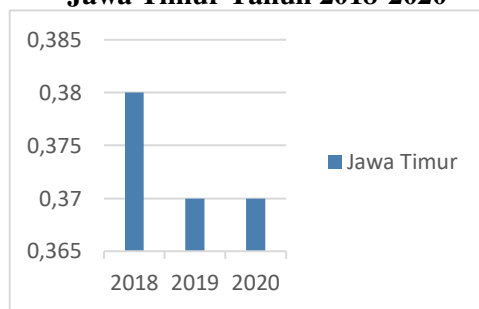
Setiap perencanaan pembangunan memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara sistematis dan terencana. Berdasarkan “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengenai Tata Cara Perencanaan, Pengendalian serta Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Rencana Kerja

Pemerintah Daerah” menyampaikan bahwasanya perencanaan pembangunan daerah memiliki tujuan menciptakan pembangunan daerah guna meningkatkan serta meratakan pendapatan masyarakat, lapangan usaha, kesempatan kerja, serta meningkatkan keunggulan bersaing dan nilai lebih suatu daerah. Hidayat (2017) menyatakan bahwa setiap negara memiliki permasalahan dalam menghadapi kebijakan awal suatu pembangunan ekonomi. Namun, selain berupaya mencapai target pembangunan juga bertujuan untuk menciptakan pemerataan secara merata. Karena tolak ukur keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan antar daerah adalah dengan

menciptakan keselarasan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang adil serta merata.

Indonesia yakni selaku negara yang luas, terdiri dari berbagai pulau mulai dari sabang hingga marauke. Memiliki aneka budaya serta suku yang berbeda antar daerah, mulai dari sosial, perekonomian, letak geografis, sumber daya alam, serta sumber daya manusia. Perihal ini akan mempengaruhi pada perkembangan suatu daerah, ada yang pertumbuhannya lebih cepat dan sebaliknya daerah yang tertinggal yang mana menyebabkan disparitas pendapatan antar wilayah (Zahara, 2017). Gambaran disparitas pendapatan ini hampir dialami disemua daerah di Indonesia, salah satunya adalah Provinsi Jawa Timur.

Gambar 1.1. Rasio Gini Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2020



Sumber : BPS Jawa Timur, 2020

Sesuai Gambar 1.1 bisa dijelaskan bahwasanya rasio gini Provinsi Jawa Timur dari tahun 2018-2020 terjadi penurunan. Bahkan ketika tahun 2019-2020 Provinsi Jawa Timur memiliki rasio gini yang stabil. Meskipun mengalami penurunan, hal ini belum terbukti bahwa disparitas pendapatan antar daerah rendah atau sudah meratanya suatu pendapatan. Teori Todaro menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi di beberapa negara berkembang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun pertumbuhan yang pesat ini tidak dirasakan oleh seluruh masyarakat secara merata, terjadinya disparitas pendapatan yang semakin tinggi ini menjadi permasalahan pembangunan. Oleh sebab itu perlunya tindakan untuk meminimalkan permasalahan tersebut serta mendorong pemerintah guna fokus pada pembangunan ekonomi kedepannya (Wulandari & Sakti, 2020).

Menurut (Suhendra et al., 2021) mengatakan bahwa munculnya perbedaan pada pendapatan, disebabkan terdapatnya variasi sumber daya yang dipunyai serta faktor produksi yaitu barang modal yang tersedia. Sedangkan teori Kuznets yaitu kurva U terbalik menjelaskan bahwa tahapan awal dalam pembangunan sering ditandai dengan terjadinya ketimpangan yang terus meningkat, tetapi seiring berjalannya pembangunan, ketimpangan pada tingkat tertentu akan mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh redistribusi pendapatan dan pendidikan yang meningkat (Prastowo et al., 2014). Teori Todaro menyatakan bahwa salah satu bekal untuk menyerap teknologi dan membentuk kemampuan dalam mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan adalah sektor pendidikan. Teori Kuznet juga menambahkan bahwa tingkat pendidikan berhubungan dengan distribusi pendapatan. Tingkat pendidikan bisa menjadi faktor dalam menurunkan atau meningkatkan disparitas pendapatan (Nuraini, 2017).

Selain itu, Pembangunan ekonomi suatu daerah juga dapat diamati dari indikator ketenagakerjaan, hal ini dapat memperlihatkan potensi, ataupun permasalahan-permasalahan, kemudian dapat dibuat dasar kebijakan dan antisipasi terjadinya hambatan dalam menuju tujuan pembangunan (BPS Jatim, 2021). Sukirno mengatakan bahwa angkatan kerja mencakup dua jenis yakni bekerja serta pengangguran (Wulandari & Sakti, 2020). Menurut teori Neoklasik apabila tenaga kerja yang kurang maju melakukan perpindahan ke wilayah yang lebih maju dan mendapatkan upah yang lebih besar, maka akan menyebabkan ketimpangan antar daerah semakin meluas (Wulandari & Sakti, 2020).

Selain itu, Prastowo et al., (2014) mengatakan jika pajak merupakan selaku kebijakan fiskal yang awalnya menjadi instrumen distribusi ekonomi yang merata serta adil. Tetapi pada kenyataannya, pajak selaku salah satu sumber masalah adanya ketimpangan. Pajak penghasilan didapatkan secara progresif yang mana penduduk berpendapatan tinggi (*high income*) membayar pajak lebih tinggi daripada penduduk berpendapatan rendah

(*low income*). Ketimpangan ini terjadi karena penduduk pendapatan tinggi belum patuh dalam membayar wajib pajak (Fahmi, 2019).

Berdasarkan permasalahan diatas, menjadikan suatu dorongan kepada penulis untuk melakukan penelitian tersebut. Dengan perbedaan variabel dan lokasi penelitian dimana peneliti lain belum meneliti variabel pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan, angkatan kerja, perpajakan di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2020.

2. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yakni permasalahan jangka panjang yang terjadi di suatu negara pada upaya untuk meningkatkan pendapatan nasional riil. Serta mengukur seberapa besar pertumbuhan ekonomi suatu negara dalam keberhasilan memproduksi barang dan jasa yang diakibatkan oleh beberapa faktor pada peningkatan jumlah dan kualitas sehingga dapat terjadi pertambahan kesejahteraan masyarakat (Faried & Sembiring, 2019).

Tingkat Pendidikan

Glasser (1992) dalam (Wulandari, 2020) mengatakan bahwa pendidikan merupakan tahapan yang dapat meningkatkan taraf hidup manusia. Selain itu pendidikan menjadi dasar atau modal bagi manusia dengan beragam ilmu, yang akan diterapkan pada kehidupan masa depan.

Angkatan Kerja

Soeroto (2002) dalam (Sofyan, 2021) mendefinisikan bahwa angkatan kerja merupakan sebagian dari populasi penduduk yang memasuki usia kerja, seperti memiliki pekerjaan dan tidak memiliki pekerjaan tetapi masih atau tidak mencari pekerjaan. Dalam kata lain, angkatan kerja yakni sebagian penduduk yang sanggup serta menyetujui melaksanakan pekerjaan.

Perpajakan

Djajadiningrat dalam (Jumaiyah & Wahidullah, 2021) mendefinisikan pajak merupakan suatu kewajiban untuk

memberikan sebagian kekayaan ke kas negara. Sedangkan (Farouq, 2018) menjelaskan pajak yakni kewajiban sesuai undang-undang serta selaku iuran wajib kepada negara yang menjadi hak orang pribadi ataupun badan hukum yang dipakai guna kepentingan umum bagi kepentingan masyarakat.

Disparitas Pendapatan

Definisi disparitas pendapatan yaitu adanya variasi total pendapatan yang didapatkan masyarakat yang mana menyebabkan semakin luasnya perbedaan pendapatan antar golongan pada masyarakat. Selain itu, disparitas pendapatan yang semakin tinggi juga berdampak pada permasalahan ekonomi dan sosial di suatu negara (Iskandar, 2021).

Hipotesis Penelitian

Ansori (2020) menjelaskan bahwa hipotesis merupakan penjelasan keterkaitan diantara variabel bebas serta variabel terikat, yang masih bersifat dugaan ataupun sementara. Berdasarkan penjelasan diatas mengenai latar belakang serta landasan teori, sehingga bisa dirumuskan hipotesis yakni:

- a. Diduga pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap disparitas pendapatan di Provinsi Jawa Timur.
- b. Diduga tingkat pendidikan berpengaruh terhadap disparitas pendapatan di Provinsi Jawa Timur.
- c. Diduga angkatan kerja berpengaruh terhadap disparitas pendapatan di Provinsi Jawa Timur.
- d. Diduga perpajakan berpengaruh terhadap disparitas pendapatan di Provinsi Jawa Timur.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian pada penelitian ini termasuk dalam deskriptif kuantitatif. Dikarenakan penelitian ini menggunakan data mencakup angka-angka yang kemudian diolah menggunakan alat analisis. Alat analisis yang dipakai pada penelitian ini yakni IBM SPSS (*Statistical Package for Social Science*) Version 26. Tempat yang akan diteliti merupakan Provinsi Jawa Timur dengan periode waktu tahun 2010-2020. Pada penelitian ini, variabel disparitas pendapatan

menggunakan satuan persen dengan pengukuran Gini Ratio. Variabel pertumbuhan ekonomi menggunakan satuan persen dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi. Variabel tingkat pendidikan menggunakan satuan persen yang diperoleh dari Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk menunjukkan level kontribusi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan. Variabel angkatan kerja menggunakan satuan persen yang diperoleh dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Variabel perpajakan menggunakan satuan persen yang diperoleh dari *tax ratio* untuk melihat seberapa jauh usaha pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan pajak ataupun penyerapan produk domestik bruto dari masyarakat pada wujud pajak.

Populasi yang dipakai pada penelitian ini yakni Provinsi Jawa Timur yang mencakup 29 Kabupaten serta 9 Kota. Memakai seluruh data *time series* (data deret waktu) seperti gini ratio, pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan, angkatan kerja, dan perpajakan selama periode 2010-2020, yaitu sebanyak 11 sampel (n) dengan jumlah 4 variabel bebas serta 1 variabel terikat. Sumber data pada penelitian ini berasal dari data sekunder yang diperoleh atas Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur selama periode 2010-2020 serta Kementerian Keuangan Republik Indonesia selama periode 2010-2020. Pengumpulan data pada penelitian ini diakses melalui permohonan data hai.djpb@kemenkeu.go.id, serta website <https://jatim.bps.go.id/>.

Metode analisis yang dipakai pada penelitian ini yakni regresi linier berganda guna mengetahui pengaruh antara empat variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Untuk menguji regresi linier berganda tersebut dapat memakai software SPSS. Menurut Imam Gunawan (2015) dalam (Sudaryano, 2021) mengungkapkan bahwa uji asumsi klasik yakni pengujian data yang dipakai guna mengetahui sesuai kriteria ataupun tidak terkait data yang diteliti yang mana nantinya guna dianalisis lebih detail sehingga dapat dipakai guna menjawab hipotesis penelitian. Uji asumsi klasik mencakup empat jenis pengujian yakni uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, serta uji heterokedastisitas.

Serta uji hipotesis terdiri dari uji f, uji t, serta koefisien determinasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilaksanakan dengan tujuan melihat bagaimana nilai residual terdistribusikan dengan normal ataupun tidak (Duli, 2019). Pada penelitian ini data penelitian diuji kenormalan distribusinya dengan menggunakan *Kolmogorov-Smienov (K-S)*.

Tabel 4.1. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		11
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.01053570
Most Extreme Differences	Absolute	.161
	Positive	.161
	Negative	-.110
Test Statistic		.161
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber: Output SPSS, 2022

Uji normalitas pada penelitian bisa dimaknai berdistribusi normal jikalau nilai Asymp. Sig. (2-tailed) melebihi 0,05. Sesuai hasil uji normalitas diatas, nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebanyak 0,200 > 0,05 yang bermakna model tersebut berdistribusi secara normal.

Regresi Linier Berganda

Analisis regresi yakni metode analisis hipotesis penelitian yang bertujuan guna menguji ada tidaknya pengaruh diantara variabel bebas terhadap variabel terikat (Febty & Teofilus, 2020). Pada penelitian ini peneliti menggunakan regresi linier berganda guna mengetahui pengaruh antara empat variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Hasil analisis regresi berganda bisa terlihat yakni:

$$Y = 1,087 - 0,001X_1 - 0,001X_2 - 0,011X_3 + 0,019X_4$$

Sesuai model persamaan itu sehingga bisa dijelaskan bahwasanya nilai konstanta sebesar 1,087. Menyatakan apabila Pertumbuhan Ekonomi (X1), Tingkat Pendidikan (X2), Angkatan Kerja (X3), serta Perpajakan (X4) dianggap konstan maka, Disparitas Pendapatan (Y) akan meningkat sebanyak 1,087 %.

Koefisien regresi (X1) sebanyak -0,001 menjelaskan bahwa Pertumbuhan Ekonomi (X1) memiliki pengaruh negatif, artinya apabila pertumbuhan ekonomi meningkat 1% mengakibatkan angka disparitas pendapatan (Y) turun sebesar 0,001%, diasumsikan X2, X3 dan X4 konstan.

Koefisien regresi (X2) sebesar -0,001 menjelaskan bahwa Tingkat Pendidikan (X2) memiliki pengaruh negatif, artinya apabila tingkat pendidikan meningkat 1% mengakibatkan angka disparitas pendapatan (Y) turun sebesar 0,001%, diasumsikan X1, X3 dan X4 konstan.

Koefisien regresi (X3) sebesar -0,011 menjelaskan bahwa Angkatan Kerja (X3) memiliki pengaruh negatif, artinya apabila angkatan kerja meningkat 1% mengakibatkan angka disparitas pendapatan (Y) turun sebesar 0,011%, diasumsikan X1, X2 dan X4 konstan.

Koefisien regresi (X4) sebesar 0,019 menjelaskan bahwa Perpajakan (X4) memiliki pengaruh positif, artinya jika angka perpajakan naik 1% mengakibatkan angka disparitas pendapatan (Y) mengalami peningkatan sebesar 0,019%, diasumsikan X1, X2 dan X3 konstan.

Uji Hipotesis

a. Uji F (Uji Simultan)

Sesuai pernyataan (Riyanto & Hatmawan, 2020) uji simultan memiliki tujuan guna mengetahui pengaruh bersama-sama diantara variabel bebas terhadap variabel terikat.

Tabel 4.5. Uji F (ANOVA)

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	.005	4	.001	7.329	.017 ^b
Residual	.001	6	.000		
Total	.007	10			

Sumber: Output SPSS, 2022

Uji simultan pada penelitian ini mempunyai nilai F hitung sebanyak 7,329 serta nilai signifikansinya 0,017 dengan ukuran signifikansinya 5 % atau 0,05, maka dapat disimpulkan nilai signifikansi $0,017 < 0,05$. Disisi lain F tabel memiliki nilai sebesar 4,53 yang diperoleh dari df pembilang bernilai 4 serta df penyebut

bernilai 6 ($n-k-1$), sehingga bisa diartikan F hitung ($7,329 > F$ tabel (4,53)). Sehingga dapat disimpulkan, H_0 ditolak serta H_1 diterima yang maknanya variabel Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pendidikan, Angkatan Kerja, dan Perpajakan mempunyai hubungan atau pengaruh positif secara bersama-sama terhadap Disparitas Pendapatan Provinsi Jawa Timur.

b. Uji t (Uji Parsial)

Uji t (Uji Parsial) bertujuan guna menentukan apakah variabel bebas secara parsial berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel terikat (Firdaus, 2021).

Tabel 4.6. Uji Parsial

Model	T _{Hitung}	T _{Tabel}	Sig.
1 X1_PE	-.474	-2.447	.652
X2_TP	-1.338	-2.447	.229
X3_AK	-2.532	-2.447	.045
X4_P	3.245	2.447	.018

Sumber: Output SPSS, 2022

Variabel Pertumbuhan Ekonomi

Sesuai hasil pengukuran uji T didapatkan nilai t hitung -0,474 dengan signifikansi 0,652, disisi lain untuk nilai t tabel -2,447 yang diperoleh dari 0,025 (α/n); df 6 ($k-n-1$). Sehingga dapat disimpulkan t hitung ($0,474 \leq t$ tabel (2,447) yang artinya H_0 diterima serta H_1 ditolak. Selanjutnya diketahui signifikansinya $0,626 > 0,05$ maknanya variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap disparitas pendapatan di Provinsi Jawa Timur.

Variabel Tingkat Pendidikan

Terkait hasil pengukuran uji T diperoleh nilai t hitung -1,338 dengan signifikansi 0,229, sedangkan untuk nilai t tabel -2,447 yang diperoleh dari 0,025 (α/n); df 6 ($k-n-1$). Sehingga dapat disimpulkan t hitung ($1,338 \leq t$ tabel (2,447) artinya H_0 diterima serta H_1 ditolak. Selanjutnya diketahui signifikansinya $0,229 > 0,05$ yang artinya variabel tingkat pendidikan tidak memiliki pengaruh terhadap disparitas pendapatan di Provinsi Jawa Timur.

Variabel Angkatan Kerja

Sesuai hasil pengukuran uji T diperoleh nilai t hitung -2,532 dengan signifikansi

0,045, disisi lain untuk nilai t tabel -2,447 yang diperoleh dari 0,025 (α/n); df 6 (k-n-1). Sehingga dapat disimpulkan t hitung (2,532) \geq t tabel (2,447) artinya H0 ditolak serta Hi diterima. Selanjutnya diketahui signifikansinya 0,045 < 0,05 maknanya variabel angkatan kerja tidak memiliki pengaruh terhadap disparitas pendapatan di Provinsi Jawa Timur.

Variabel Perpajakan

Sesuai hasil pengukuran uji T diperoleh nilai t hitung 3,245 dengan signifikansi 0,018, sedangkan untuk nilai t tabel 2.447 yang diperoleh dari 0,025 (α/n); df 6 (k-n-1). Sehingga dapat disimpulkan t hitung (3,245) \geq t tabel (2,447) artinya H0 ditolak serta Hi diterima. Selanjutnya diketahui signifikansinya 0,018 < 0,05 yang artinya variabel perpajakan berpengaruh terhadap disparitas pendapatan di Provinsi Jawa Timur.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut (Riyanto & Hatmawan, 2020) menjelaskan bahwa koefisien determinasi (R^2) memiliki tujuan guna melakukan pengukuran bagaimana kesanggupan model saat menjelaskan variasi variabel terikat (variabel independen).

Tabel 4.7. Koefisien Determinasi (Model Summary)

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
.911 ^a	.830	.717	.013602

Sumber: Output SPSS, 2022

Sesuai hasil pengelolaan data bisa terlihat nilai koefisien determinasi sebanyak 0,830% yang merupakan 83,0% dari semua pengamatan, perihai ini memperlihatkan bahwasanya variabel bebas yakni Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pendidikan, Angkatan Kerja, serta Perpajakan dapat menjelaskan variabel dependen yaitu Disparitas Pendapatan. Disisi lain sisanya 17,0 diterangkan oleh variabel lain yang tidak ada pada model penelitian.

Pembahasan Penelitian

Penelitian ini menguji seberapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan, angkatan kerja serta perpajakan terhadap disparitas pendapatan di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan pengujian

terhadap hipotesis dalam penelitian, berikut merupakan penjelasan secara rinci.

a. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Disparitas Pendapatan di Provinsi Jawa Timur

Pada hasil uji parsial menunjukan bahwasanya pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh serta bernilai negatif terhadap disparitas pendapatan di Provinsi Jawa Timur ketika periode 2010-2020. Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian sebelumnya yaitu (Pinilih, 2021) dan (Sayifullah, 2021) yang menjelaskan bahwasanya pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh terhadap disparitas pendapatan. Tetapi sebaliknya, (Fahmi, 2019) pada hasil penelitian sebelumnya mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi mempengaruhi disparitas pendapatan.

Pertumbuhan ekonomi yang tidak signifikan, menjelaskan bahwa meningkatnya pertumbuhan ekonomi tidak menyebabkan penurunan terhadap disparitas pendapatan (Pinilih, 2021). Pada penelitian ini, tidak signifikannya variabel pertumbuhan ekonomi terhadap disparitas pendapatan di Provinsi Jawa Timur dapat disebabkan karena distribusi pendapatan yang tidak merata antar kabupaten atau kota di wilayah tersebut. Sesuai data BPS, jika dilihat pada pertumbuhan ekonomi setiap daerah di Provinsi Jawa Timur memperlihatkan perkembangan laju pertumbuhan yang jauh berbeda. Meskipun pada setiap daerah mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya. Namun hal itu belum diimbangi dengan pemerataan pendapatan pada masing-masing daerah.

Menurut Todaro dalam (Wulandari & Sakti, 2020) pertumbuhan ekonomi di beberapa negara berkembang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Selain itu pertumbuhan yang pesat ini tidak dirasakan oleh seluruh masyarakat secara merata. Damanhuri et al. (2021) mengatakan bahwa tingginya angka pertumbuhan ekonomi dapat menentukan berhasil atau tidaknya perekonomian suatu negara. Namun keberhasilan ekonomi secara umum dapat dilihat dari aspek kesejahteraan masyarakat dan hal tersebut dapat diketahui melalui segi pemerataan pendapatan.

Teori Kuznet (1991) dalam (Hasan et al., 2020) juga menjelaskan bahwa tingkat ketimpangan distribusi pendapatan pada awal pembangunan akan semakin meningkat, namun pada tahap tertentu dan selanjutnya tingkat disparitas pendapatan akan mengalami penurunan. Artinya pertumbuhan ekonomi terhadap disparitas pendapatan pada jangka pendek terdapat korelasi positif, tetapi pada jangka panjang memiliki pengaruh yang negatif.

b. Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Disparitas Pendapatan di Provinsi Jawa Timur

Pada hasil uji parsial menunjukan bahwasanya tingkat pendidikan tidak berpengaruh dan bernilai negatif terhadap disparitas pendapatan di Provinsi Jawa Timur ketika periode 2010-2020. Hasil penelitian ini ditunjang dengan penelitian sebelumnya (Matondang, 2018), (Anshari et al., 2018) yang mengemukakan bahwasanya tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap disparitas pendapatan. Tetapi sebaliknya, hasil berbeda pada penelitian sebelumnya (Wulandari & Sakti, 2020)(Fahmi, 2019)(Fahmi, 2019)(Fahmi, 2019)(Fahmi, 2019) yang mengatakan bahwa tingkat pendidikan mempengaruhi disparitas pendapatan.

Tingkat pendidikan yang tidak signifikan, menjelaskan bahwa meningkatnya pendidikan tidak menyebabkan penurunan terhadap disparitas pendapatan. Namun hal ini bertentangan dengan teori Arham (2020) yang mengatakan permasalahan ketimpangan pendapatan terhadap pendidikan merupakan hal yang cukup serius. Sebab pendidikan merupakan modal sumber daya manusia yang berpengaruh dalam menghasilkan pendapatan. Selain itu ketimpangan pendapatan menjadi salah satu faktor kesenjangan terhadap hasil pendidikan.

Pada penelitian ini, tidak signifikannya variabel tingkat pendidikan terhadap disparitas pendapatan di Provinsi Jawa Timur dikarenakan kualitas pendidikan yang masih rendah di beberapa daerah tertinggal. Sedangkan, daerah perkotaan memiliki tingkat partisipasi lebih tinggi dari pada daerah perdesaan. Situasi ini disebabkan keberadaan fasilitas pendidikan

yang lebih banyak terletak di daerah perkotaan (BPS Jatim, 2019).

Selain itu, orang dengan pendidikan yang tinggi cenderung mendapatkan pendapatan yang tinggi. Namun pada realitanya orang dengan tamatan perguruan tinggi cenderung mayoritas berstatus pengangguran. Hal tersebut dialami sebab susah mencari lapangan pekerjaan dan menyebabkan pengangguran tidak memiliki pendapatan. Perihal ini mengakibatkan makin tingginya disparitas pendapatan pada suatu wilayah (Anshari et al., 2018).

c. Pengaruh Angkatan Kerja Terhadap Disparitas Pendapatan di Provinsi Jawa Timur

Pada hasil uji parsial menunjukan bahwasanya angkatan kerja berpengaruh negatif terhadap disparitas pendapatan di Provinsi Jawa Timur ketika periode 2010-2020. Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian sebelumnya (Wulandari & Sakti, 2020) serta (Laut et al., 2020) yang mengemukakan bahwasanya angkatan kerja memiliki pengaruh terhadap disparitas pendapatan. Namun sebaliknya, hasil berbeda pada penelitian sebelumnya (Pinilih, 2021) mengatakan bahwasanya angkatan kerja tidak membagikan pengaruh terhadap disparitas pendapatan.

Angkatan kerja yang signifikan, menjelaskan bahwa semakin meningkatnya angkatan kerja dapat menurunkan disparitas pendapatan. Menurut (BPS Jawa Timur, 2020) menjelaskan bahwasanya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terjadi kenaikan tiap tahunnya. Artinya, total penduduk di Jawa Timur akan kian naik dari tahun ke tahun dan menyebabkan jumlah angkatan kerja juga ikut meningkat. Sektor pertanian merupakan lapangan usaha utama bagi penduduk di provinsi Jawa Timur yang menyerap secara aktif pada tingkat partisipasi angkatan kerja dalam perekonomian. Disamping itu, (Majid, 2021) menjelaskan bahwa tingkat angkatan kerja yang meningkat harus diselaraskan dengan perluasan akan kesempatan kerja dengan tujuan menambah tingkat pendapatan dan mengurangi kemiskinan. Namun, jika tidak diikuti dengan perluasan maka akan menjadi masalah terhadap pembangunan ekonomi yang

mengakibatkan meningkatnya kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.

d. Pengaruh Perpajakan Terhadap Disparitas Pendapatan di Provinsi Jawa Timur

Pada hasil uji parsial menunjukan bahwasanya perpajakan berpengaruh signifikan terhadap disparitas pendapatan di Provinsi Jawa Timur ketika periode 2010-2020. Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian sebelumnya (Fahmi, 2019) yang mengemukakan bahwasanya perpajakan berpengaruh terhadap disparitas pendapatan.

Pajak penghasilan yang signifikan, menjelaskan bahwa semakin meningkatnya pajak penghasilan maka dapat menyebabkan peningkatan pada disparitas pendapatan. Hal tersebut juga sesuai dengan teori (Prastowo et al., 2014) yang menjelaskan bahwa pajak merupakan salah satu referensi kesenjangan sebab prinsip-prinsip keadilan pada perpajakan tidak dapat berjalan. Sebab terdapat diberbagai golongan penduduk seperti penduduk kaya dan penduduk miskin. Selain itu, masyarakat golongan kaya juga melakukan kecurangan secara legal atau illegal guna meminimalkan tanggungan pajak yang dimiliki, perihal ini yang mengakibatkan terdapatnya ketimpangan pendapatan pada masyarakat.

Menurut data (Kemenkeu Jatim, 2020), perkembangan *tax ratio* pemerintah provinsi Jawa Timur tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Rasio pajak tertinggi diperoleh provinsi Jawa Timur pada tahun 2017 yakni sebanyak 9,68% dan terendah pada tahun 2010 yakni sebanyak 5,96%. Namun jika dilihat berdasarkan setiap daerah, maka *tax ratio* akan terlihat memprihatinkan karena menunjukan kondisi kesenjangan antara daerah maju dan daerah kurang maju. Perihal ini juga selaras dengan penelitian (Fahmi, 2019) yang menjelaskan bahwasanya redistribusi melalui pajak (PPH serta PBB) tidak dapat mengevaluasi kesenjangan pendapatan. Selain pajak, Indonesia termasuk provinsi Jawa Timur memiliki alternatif lain dalam meredistribusi pendapatan selain pajak, seperti melalui program BPJS Kesehatan, pemberian kredit lunak dengan KUR (Kredit Usaha Rakyat) serta Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM

Mandiri Pedesaan) yang mana harapannya bisa mempercepat pemerataan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja pada daerah yang belum maju.

Pada kebijakan penerapan tarif Pajak Penghasilan/ PPh diperlukan adanya revisi yang diharapkan dapat menciptakan keadilan sosial. Dengan memperimbangkan dapat menurunkan ketimpangan, sehingga pemerintah bisa menetapkan pajak pada mereka yang berpenghasilan diatas Rp 5 miliar pertahun sebesar 35-40%. Tarif pajak yang bagi yang memiliki kekayaan Rp 100 miliar dengan mereka yang memiliki kekayaan Rp 500 juta sebanyak 30%, meskipun pajak penghasilan jenis ini tidaklah adil (Prastowo et al., 2014).

5. KESIMPULAN

Berdasarkan berbagai teori, hasil sertapembahasan yang sudah dijelaskan, sehingga peneliti bisa mengambil kesimpulan yakni:

a. Dari hasil pengukuran uji parsial diperoleh $t \text{ hitung } (0,474) \leq t \text{ tabel } (2,447)$ yang artinya H_0 diterima serta H_1 ditolak. Selain itu, diketahui signifikansinya sebanyak $0,626 > 0,05$ artinya pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap disparitas pendapatan di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2020. Pada penelitian ini, tidak signifikannya variabel pertumbuhan ekonomi terhadap disparitas pendapatan di Provinsi Jawa Timur dapat disebabkan karena distribusi pendapatan yang tidak merata antar kabupaten atau kota di wilayah tersebut.

b. Dari hasil pengukuran uji parsial diperoleh $t \text{ hitung } (1,338) \leq t \text{ tabel } (2,447)$ yang artinya H_0 diterima serta H_1 ditolak. Selain itu, diketahui signifikansinya sebanyak $0,229 > 0,05$ yang artinya tingkat pendidikan tidak memiliki pengaruh terhadap disparitas pendapatan di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2020. Pada penelitian ini, tidak signifikannya variabel tingkat pendidikan terhadap disparitas pendapatan di Provinsi Jawa Timur dikarenakan kualitas pendidikan yang masih rendah di beberapa daerah tertinggal. Sedangkan, daerah perkotaan memiliki tingkat partisipasi lebih tinggi dari pada daerah pedesaan. Situasi ini disebabkan keberadaan fasilitas

pendidikan yang lebih banyak terletak di daerah perkotaan.

c. Dari hasil pengukuran uji parsial diperoleh t hitung $(2,532) \geq t$ tabel $(2,447)$ artinya H_0 ditolak serta H_1 diterima. Selain itu, diketahui signifikansinya sebesar $0,045 < 0,05$ yang artinya angkatan kerja berpengaruh terhadap disparitas pendapatan di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2020. Keianikan angkatan kerja yang tinggi harus diselaraskan dengan perluasan akan kesempatan kerja dengan tujuan menambah tingkat pendapatan dan mengurangi kemiskinan. Namun, jika tidak diikuti dengan perluasan maka akan menjadi masalah terhadap pembangunan ekonomi yang mengakibatkan meningkatnya kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.

d. Sesuai hasil pengukuran uji t didapatkan t hitung $(3,245) \geq t$ tabel $(2,447)$ artinya H_0 ditolak serta H_1 diterima. Selain itu, diketahui signifikansinya sebesar $0,018 < 0,05$ artinya perpajakan berpengaruh terhadap disparitas pendapatan di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2020. Namun, redistribusi melalui pajak (PPH serta PBB) tidak dapat mengevaluasi kesenjangan pendapatan. Selain pajak, Indonesia termasuk provinsi Jawa Timur memiliki alternatif lain dalam meredistribusi pendapatan selain pajak, seperti melalui program BPJS Kesehatan, pemberian kredit lunak dengan KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM Mandiri Pedesaan) harapannya bisa mempercepat pemerataan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja pada daerah yang belum maju.

6. REFERENSI

- Anshari, M., Azhar, Z., & Ariusni. (2018). Analisis Pengaruh Pendidikan, Upah Minimum Provinsi Dan Belanja Modal Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Seluruh Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Ecogen*, 1(3), 494–502.
- Ansori, M. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif Edisi 2*. Airlangga University Press.
- Arham, M. A. (2020). *Perekonomian Gorontalo: Perkembangan, Agenda Dan Tantangan Ke Depan*. Deepublish.
- Badan Pusat Statistik. (2021). Gini Rasio Provinsi Tahun 2011-2020. BPS. <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1116>
- Badan Pusat Statistik. (2021). Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Jawa Timur Agustus 2011-2020. BPS Jawa Timur. <https://jatim.bps.go.id/indikator/6/277/1/tingkat-partisipasiangkatan-kerja-tpak.html>
- Badan Pusat Statistik. (2021). Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Menurut Lapangan Usaha 2011-2020. BPS Jawa Timur.
- Badan Pusat Statistik. (2021). Statistik Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2020. BPS Jawa Timur. https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data/0000/data/303/sdgs_4/1
- Damanhuri, D. S., Hakim, I., Ramdani, P., Nuryanto, I., Fatimah, H., Fuadi, R., Aji, S., Maulana, M. I., Ryansha, E., & Fatwani, K. I. (2021). *Riset Ekonomi Politik: Korupsi, Perburuan Rente, Ketimpangan, dan Kelembagaan Ekonomi*. PT Penerbit IPB Press.
- Duli, N. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Beberapa Konsep Dasar Untuk Penulisan Skripsi & Analisis Data dengan SPSS*. Budi Utama.
- Fahmi, A. (2019). Keterkaitan Antara Penerimaan Pajak Penghasilan Dan PBB Terhadap Kesenjangan Pendapatan. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 6(1), 39–54.
- Faried, A. I., & Sembiring, R. (2019). *Perekonomian Indonesia: Antara Konsep dan Realita Keberlanjutan Pembangunan*. Yayasan Kita Menulis.
- Farouq, M. (2018). *Hukum Pajak di Indonesia*. Prenada Media.
- Febty, T., & Teofilus. (2020). *SPSS: Aplikasi Pada Penelitian Manajemen Bisnis*. Media Sains Indonesia.
- Firdaus. (2021). *Metodologi Penelitian Kuantitatif; Dilengkapi Analisis Regresi IBM SPSS Statistics Version 26.0*. DOTPLUS.
- Hasan, M., Alim, M. S., Alfiani, S. M., & Shafar, M. R. (2020). *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi*. Media Sains Indonesia.
- Hidayat, W. (2017). Perencanaan Pembangunan Daerah: Pendekatan Pertumbuhan Ekonomi, Disparitas Pendapatan dan Kemiskinan di Jawa

- Timur. UMMPress.
<https://books.google.co.id/books?id=GSxjDwAAQBAJ&lpg=PP1&pg=PP1#v=onepage&q&f=false>
- Iskandar, A. M. (2021). *Negara dan Politik Kesejahteraan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Jumaiyah, & Wahidullah. (2021). *PAJAK PENGHASILAN: Teori, Kasus dan Praktik*. Penerbit Andi.
- Kementerian Keuangan. (2020). Kajian Fiskal Regional Provinsi Jawa Timur. https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/images/file_artikel/file_pdf/kfr/2020/15KFR_2020_Jawa_Timur.pdf. Diakses tanggal 1 Desember 2021
- Laut, L. T., Putri, A. S., & Septiani, Y. (2020). Pengaruh PMA, PMDN, TPAK, PDRB Perkapita, Pengeluaran Pemerintah Terhadap Disparitas Pendapatan Jawa. *Stability: Journal of Management and Business*, 3(2), 21–34. <https://doi.org/10.26877/sta.v3i2.7781>
- Majid, R. (2021). *Dasar Kependudukan*. Nasya Expanding Management.
- Matondang, Z. (2018). Pengaruh Jumlah Penduduk, Jumlah Pengangguran dan Tingkat Pendidikan Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Desa Palopat Maria Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru. *Ihtiyath*, 2(2), 255–270.
- Nuraini, E. (2017). PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP DISPARITAS PENDAPATAN DI WILAYAH GERBANGKERTOSUSILA. *Jurnal ekonomi pendidikan dan kewirausahaan*, 5(1), 52–67.
- Pinilih, M. (2021). Disparitas Pendapatan di Jawa Tengah. *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 8(1), 42. <https://doi.org/10.19184/ejeba.v8i1.19231>
- Prastowo, Y., Maftuchan, A., Yusuf, A. A., Firdaus, M., Kinasih, H. N., Ahmady, I., Tangka, M. V., Tursiah, & Bahagijo, S. (2014). *Ketimpangan Pembangunan Indonesia Dari Berbagai Aspek*. Infid.
- Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. <https://www.kemendagri.go.id/arsip/detail/10522/permendagri-no-86-tahun-2017>. Diakses tanggal 1 Desember 2021.
- Riyanto, S., & Hatmawan, A. A. (2020). *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian Di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan dan Eksperimen*. Budi Utama.
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan Penelitian Kuantitatif: Quantitative Research Approach*. Budi Utama.
- Sayifullah. (2021). PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP DISPARITAS PENDAPATAN DI INDONESIA. *JEQu : Jurnal Untirta*, 11(1), 21–36.
- Sofyan, M. (2021). *Pengembangan Sektor Unggulan Pendukung Perluasan Kesempatan Kerja di Provinsi Jawa Tengah*. CV ODIS.
- Sudaryano. (2021). *Statistik II: Statistik Inferensial untuk Penelitian*. ANDI (Anggota IKAPI).
- Suhendra, I., Gianjar, R. A., & Istikomah, N. (2021). *Distribusi Pendapatan: Konteks Provinsi di Indonesia*. Media Sains Indonesia.
- Wulandari, D., & Sakti, R. K. (2020). ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, AGLOMERASI INDUSTRI PENGOLAHAN, DAN ANGKATAN KERJA TERHADAP DISPARITAS PENDAPATAN (Studi Kasus Pada Kawasan Gerbangkertosusila Periode 2009-2018). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 1–15.
- Wulandari, T. (2020). *Konsep dan Praksis Pendidikan Multikultural*. UNY Press.
- Zahara, A. (2017). ANALISIS DISPARITAS PENDAPATAN DAN POLA PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI ACEH PERIODE 2002-2012. *Jurnal Akuntansi dan Pembangunan (JAKTABANGUN) STIE Lhokseumawe*, 1, 139–151.